**Nama: Fitria Almaysuri**

**NPM: 2156041024**

**Kelas: Reg M**

**Mata Kuliah: Manajemen Strategis Sektor Publik (UTS)**

**MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK & CIVIL SOCIETY**

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, peran masyarakat sipil atau civil society menjadi semakin penting dalam dinamika sosial dan politik suatu negara. Civil society merujuk pada jaringan organisasi, kelompok, dan individu yang beroperasi di luar pemerintahan dan sektor bisnis dengan tujuan untuk memperjuangkan beragam isu sosial, politik, dan lingkungan. Dalam konteks ini, manajemen strategi civil society menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran serta kontribusi mereka dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat yang beragam. Manajemen strategi civil society adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi masyarakat sipil dengan cara yang terorganisir dan terencana. Ini melibatkan pengembangan rencana jangka panjang, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi masyarakat sipil tercapai secara efisien dan efektif. Civil society memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung demokrasi, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Manajemen strategi civil society memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat, persaingan sumber daya yang ketat, dan kompleksitas isu-isu yang mereka hadapi. Dalam tulisan ini, kami akan menjelajahi konsep manajemen strategi civil society lebih dalam, mencakup pengertian, tantangan, dan pentingnya pendekatan ini dalam mendukung peran yang semakin penting dari masyarakat sipil dalam mewujudkan perubahan positif di masyarakat. Kami juga akan membahas berbagai aspek penting dari manajemen strategi civil society, seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi dampak, serta bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat upaya masyarakat sipil untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

**PEMBAHASAN**

1. **Manajemen Strategis Sektor Publik**

Salusu (1996: 490) mengemukakan bahwa dalam setiap organisasi, keputusan strategis dan rencana strategis dipersiapkan oleh kelompok manajemen strategis, yang sering disebut sebagai manajemen puncak. Tugas utama mereka adalah merumuskan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, membuat keputusan strategis, menyusun rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan tersebut, serta menilai implementasi strategi.

Menurut Heene (2010: 76), manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai proses di mana organisasi mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi melalui langkah-langkah seperti analisis strategi yang tepat, pembuatan strategi yang memanfaatkan keunggulan, pelaksanaan strategi yang akurat, dan evaluasi terus menerus terhadap kinerja mereka. Viljoen (1994) juga menggambarkan manajemen strategi sebagai proses identifikasi, pemilihan, dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kinerja jangka panjang organisasi, sejalan dengan perubahan dalam lingkungan operasional. Joyce (1999) menyoroti fleksibilitas dalam pengertian manajemen strategi karena organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan memiliki beragam jenis aktivitas strategis.

Selanjutnya, menurut Heene et al. (2010: 76), manajemen strategis merujuk pada pengelompokan dan orientasi semua fungsi dan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai agenda strategiknya. Tujuan manajemen strategi adalah menciptakan efektivitas jangka panjang bagi organisasi dengan mengintegrasikan proses manajemen lainnya, mengembangkan pendekatan sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan serta mengaktualisasikan tujuan organisasi, dan memantau serta mengevaluasi kinerjanya.

Akdon (2011: 277) merumuskan manajemen strategis sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi-fungsi organisasi, untuk mencapai tujuan-tujuan di masa depan. Manajemen strategi terdiri dari tiga proses utama, yakni merumuskan strategi dengan mengembangkan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal, serta menyusun alternatif strategi yang sesuai untuk diterapkan.

Bryson (1999: 4-5) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai usaha yang terstruktur untuk membuat keputusan dan langkah-langkah kunci yang membentuk dan mengarahkan arah tindakan organisasi, apa yang akan mereka lakukan, dan alasan di balik tindakan tersebut. Perencanaan strategis mewajibkan pengumpulan informasi luas, eksplorasi opsi alternatif, dan menekankan konsekuensi jangka panjang dari keputusan saat ini. Salusu (1996: 500) juga menggambarkan perencanaan strategis sebagai alat kepemimpinan dan sebagai suatu proses yang menentukan visi organisasi di masa depan serta bagaimana mencapainya, dengan merinci tujuan-tujuan yang diinginkan.

Rencana strategi tidak selalu berjalan mulus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bryson (1999: 227-228). Ada empat tantangan yang perlu diatasi dengan efektif dalam perencanaan strategis:

1. Permasalahan Manajemen adalah masalah perhatian dan komitmen manusia. Fokus utama orang-orang kunci harus ditempatkan pada isu-isu, keputusan, konflik, dan preferensi kebijakan di tingkat utama dalam hierarki organisasi.
2. Permasalahan Proses adalah bagaimana mengubah ide strategis menjadi aspek yang dapat diterapkan. Ide-ide yang tidak konvensional harus diubah menjadi ide yang lebih dapat diterima.
3. Permasalahan Struktural adalah tentang mengelola hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan organisasi. Kaitan yang menguntungkan antara lingkungan internal dan eksternal harus dijaga.
4. Permasalahan Institusional adalah tentang menerapkan kepemimpinan yang transformatif. Salah satu permasalahan paling kompleks dalam perencanaan strategis hanya dapat diatasi melalui transformasi institusi, yang memerlukan kepemimpinan yang kuat.

Thompson dan Strickland, seperti yang disebutkan dalam Salusu (1996: 436-437), mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan implementasi strategi adalah mengintegrasikan seluruh organisasi untuk mendukung strategi dan memastikan bahwa setiap tugas administratif dilakukan sesuai dengan persyaratan yang tepat. Oleh karena itu, implementasi strategi yang berhasil memerlukan dukungan, disiplin, motivasi, dan kerja keras dari seluruh manajer, kepala unit kerja, dan karyawan.

1. **Civil Society**

Sumarto (2009: 15) mendefinisikan masyarakat madani (civil society) sebagai ruang di mana beragam kelompok sosial, termasuk Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat di tingkat akar rumput, media, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lainnya, dapat menjadi kekuatan yang seimbang dengan pemerintah dan sektor swasta. Dengan kata lain, ini adalah tempat di mana masyarakat berperan sebagai penyeimbang terhadap pemerintah dan sektor swasta.

Sementara itu, Rosyada et al. (2003: 240-241) merinci beberapa definisi masyarakat madani menurut para ahli:

1. Anwar Ibrahim menyatakan masyarakat madani sebagai sistem sosial yang berkembang berdasarkan prinsip moral yang mengharmonisasikan kebebasan individu dengan stabilitas masyarakat. Masyarakat madani mendorong inisiatif individu di berbagai aspek kehidupan, termasuk pemikiran, seni, dan pelaksanaan pemerintahan yang berpegang pada hukum, bukan dorongan egois individu. Ini menciptakan prediktabilitas dan transparansi dalam sistem.
2. Muhammad AS. Hikam mendefinisikan masyarakat madani sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri seperti kesukarelaan, kemandirian, dan keterlibatan. Masyarakat madani ini memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam hubungannya dengan negara dan mengikuti norma-norma hukum yang berlaku.

Menurut Gellner, sebagaimana diuraikan dalam Rosyada et al. (2003: 119-120), masyarakat madani bukan hanya menjadi prasyarat bagi demokrasi, tetapi juga memiliki nilai-nilai intrinsik seperti kebebasan dan kemandirian yang memengaruhi hubungan horizontal antarwarga negara serta hubungan vertikal antara negara dan masyarakat. Masyarakat madani ini, dalam bentuk konkritnya, diwakili oleh organisasi di luar pemerintah yang dikenal sebagai NGO (Non-Government Organization) atau di Indonesia dikenal sebagai LSM. Masyarakat madani dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut.

Dari beberapa definisi tentang Civil Society atau masyarakat madani yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat merangkum beberapa poin penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat madani sangat penting dalam mendukung good governance dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.
2. Civil Society terorganisir melalui organisasi seperti NGO (Non-Government Organization) dan LSM, yang bersama-sama dikenal sebagai Civil Society Organization (CSOs).
3. CSOs memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan partisipatif.
4. CSOs memiliki kemampuan untuk mengembangkan metode dan pendekatan baru untuk penelitian dan perencanaan pembangunan, serta menciptakan inovasi.
5. CSOs ditandai oleh kesukarelaan, kemandirian, dan keterlibatan dalam norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh anggotanya.

Sumarto (2009: 31) menjelaskan bahwa CSOs telah melakukan berbagai kegiatan khusus untuk memfasilitasi partisipasi menuju Good Governance, seperti:

1. Peningkatan Kesadaran (Awareness Raising)
2. engenalkan konsep-konsep pembangunan partisipatif dalam pengambilan keputusan publik.
3. Mendorong eksekutif dan legislatif untuk lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan publik.
5. Advokasi Kebijakan (Policy Advocacy)
6. Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendorong partisipasi.
7. Mendorong proses partisipatif dalam pembentukan peraturan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
8. Memberikan insentif untuk mendorong partisipasi.
9. Mendorong kemitraan antara pemerintah dan masyarakat madani untuk proyek-proyek inovatif dan partisipatif.
10. Memantau program pemerintah dengan komponen partisipasi.
11. Mempengaruhi kebijakan lembaga donor internasional tentang partisipasi dan tata kelola.
12. Pengembangan Institusi (Institution Building)
13. Mendorong pembentukan forum warga dan dewan kota.
14. Memastikan partisipasi kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya.
15. Meningkatkan jaringan antara lembaga masyarakat madani di daerah.
16. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga donor internasional.
17. Mendukung komunitas dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk rencana partisipatif.
18. Memberikan pelatihan pendidikan sipil untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan partisipasi.
19. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)
20. Mengembangkan metode partisipatif alternatif dan teknik partisipasi.
21. Melatih fasilitator berpengalaman untuk mendukung proses partisipasi.
22. Membangun sistem informasi dan komunikasi berbasis komunitas.
23. Melatih pemangku kepentingan dalam penggunaan metode partisipatif.

**PENUTUP**

Manajemen strategis civil society adalah landasan penting dalam perjuangan masyarakat sipil untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat dan dunia. Dalam sebuah lingkungan yang terus berubah, organisasi dan individu yang bergerak di ranah civil society perlu mengadopsi pendekatan manajemen yang terarah, terorganisir, dan adaptif. Ini tidak hanya membantu mereka mengelola sumber daya dengan lebih efisien, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjawab dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi dengan lebih baik. Manajemen strategi civil society memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk lebih fokus pada tujuan mereka, mengukur dampak dari upaya mereka, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi internasional. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa suara masyarakat sipil didengar dan bahwa aspirasi mereka diintegrasikan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata. Saat kita memasuki masa depan, manajemen strategi civil society akan menjadi semakin penting, mengingat tantangan yang terus berkembang yang dihadapi oleh masyarakat sipil. Perubahan iklim, isu-isu hak asasi manusia, ketimpangan sosial, dan tantangan global lainnya membutuhkan respon yang terencana dan terkoordinasi. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan pengembangan pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategi menjadi esensial dalam menjaga relevansi dan efektivitas civil society di masa depan. Manajemen strategi civil society bukan hanya tentang kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga tentang pengaruh dan perubahan yang mereka bawa kepada dunia. Dengan pendekatan ini, civil society dapat menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam memperjuangkan perubahan positif, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dan memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Sehingga, penting untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan manajemen strategi dalam upaya masyarakat sipil menuju masa depan yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Heene, dkk. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Rafika Aditama

Akdon. 2011. Manajemen Stategik untuk Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Bryson, John M. 1999. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Salusu, J. 2015. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sumarto, Hetifah SJ. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Medika

**Jurnal**

Slambi, Erni Dwita., et.al. 2016. Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Merauke. Ejournal Ummus, Vo. 4, No. 1

Mardiyanta, Antun. (2011). Kebijakan Publik Delibratif. Vol. 24, No.3